

WACANA

NO 239 TH KE-70

HARIAN
BERNAS



Parampara Praja, Menuju Politik Rakyat

Oleh: Hendra Kurniawan

DALAM konsep kepemimpinan keraton, termasuk Yogyakarta, seorang raja atau sultan bukanlah orang sembarangan. Diyakini mereka yang memperoleh *wahyu tumurun* merupakan orang pilihan, selain asal usul mereka sebagai keturunan yang unggul. Hal ini terungkap dalam pernyataan *trahing kusuma, rembesing madu, wijiling naratapa, tedaking andana warih*. Tentu berbeda dengan konsep kepemimpinan modern, bukan soal *trah*, namun yang terpenting memiliki kapasitas, mampu memecahkan masalah, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam situasi masyarakat saat ini, dengan berbagai masalah yang semakin kompleks, maka upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan juga semakin berat. Selain itu jiwa zaman juga telah berubah, feodalisme tidak lagi diterima dan telah diganti dengan kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Dalam ruang itulah, Kasultanan Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan menyatakan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status khusus sebagai daerah istimewa. Teranyar, perihal keistimewaan ini diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 3 Tahun 2015.

Sebagai tindak lanjut dari penerapan aturan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada tanggal 30 Agustus 2016 telah melantik anggota Dewan Parampara Praja. Ada delapan orang yang

mengisi posisi tersebut yakni, Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H. S.U. (ahli hukum), Prof. Dr. dr. Soetaryo, Sp.A(K). (praktisi kesehatan), Prof. Dr. A.M. Hermien Kusmayati, S.ST., S.U. (budayawan), Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (ahli ekonomi), Prof. Dr. M. Amin Abdullah (tokoh agama), Suyitno, S.H., M.S. (pakar pertanahan), G.K.R. Mangkubumi (puteri sulung Sri Sultan HB X), dan G.P.H. Wijoyo Harimurti (adik Paku Alam X).

Dalam sambutan saat pelantikan, Sultan menegaskan bahwa *Parampara Praja* diharapkan dapat menjadi tonggak strategis untuk menuju keistimewaan Yogyakarta yang otentik, yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat. Meskipun masih menimbulkan penafsiran beragam, namun pada prinsipnya *Parampara Praja* memiliki tugas istimewa, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan substansi atas program-program keistimewaan DIY kepada Sultan. Oleh karena itu, orang-orang yang dilibatkan di dalamnya terdiri dari berbagai macam latar belakang. Mereka dianggap memiliki pemahaman yang mendalam sehingga akan mampu memberi gagasan, inspirasi, dan pertimbangan terkait soal keistimewaan.

Dalam konteks pelaksanaan demokrasi, hadirnya *Parampara Praja*

boleh disebut sebagai titik dimulainya perubahan dari era politik elitis menuju politik rakyat. Sebagai sebuah manifestasi dari harapan masyarakat, maka menjadi tantangan berat bagi Dewan ini agar tidak mengecewakan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Sultan, mereka yang diangkat diyakini sudah selesai dengan dirinya sendiri dan tidak memiliki kepentingan apa pun kecuali untuk masyarakat. Maka perlu dibangkitkan kembali semangat untuk *cancut taliwanda, golong gilig, saiyeg saeka kapti* dalam membangun kesejatan dari Jōgja Istimewa.

Paling tidak ada lima prioritas terkait keistimewaan Yogyakarta yang saat ini perlu memperoleh perhatian serius. *Pertama*, soal tata ruang. Pesatnya pembangunan di Yogyakarta meminggirkan ruang sosial dan budaya masyarakat. Keberadaan kampung di kawasan perkotaan kini mulai lenyap. Belum lagi soal berdirinya bangunan-bangunan modern yang melupakan basis kelokalan. *Kedua*, kasus pertanahan. Masalah kepemilikan tanah di Yogyakarta terus menjadi persoalan terkait dengan keberadaan *Sultan Ground* dan *Paku Alam Ground*. Belum lagi masalah hak milik tanah bagi warga Tionghoa di Yogyakarta yang masih sarat unsur diskriminasi.

Ketiga, terkait dengan pengisian

jabatan gubernur. Dalam hal ini terjadi tarik menarik antara aturan keistimewaan dengan suksesi tahta sesuai dengan adat keraton. Berulang kali hal ini memanaskan terutama setelah Sultan menitahkan *Sabdaraja* beberapa waktu silam. *Keempat*, terkait penyusunan Perdais yang perlu memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan masyarakat, strategi budaya, dan perkembangan zaman dewasa ini. *Kelima*, masalah pembangunan bandara yang sampai sekarang belum menemui titik terang juga harus segera diselesaikan. Terlebih banyak kepentingan umum yang dipertaruhkan dalam persoalan ini.

Selain persoalan-persoalan krusial tersebut, tentu masih banyak hal lain yang menjadi tugas *Parampara Praja* untuk memikirkan dan mengkajinya. Mereka harus mampu membuktikan kinerjanya dengan memberi berbagai sumbang-sih pemikiran maupun inovasi yang konstruktif. Memang bagaimana pun sebagai dewan penasihat, posisi *Parampara Praja* bersifat menunggu perintah atau permasalahan sebagai umpan yang dilontarkan Sultan. Tugas yang mereka emban bisa berat, bisa ringan, tergantung keperluan dan permintaan Sultan. Akan tetapi, waktu terus bergulir, maka tak ada salahnya jemput bola demi kepentingan masyarakat. **

Hendra Kurniawan, M.Pd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.